

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU**

NO	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak terbatas
2	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
3	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
5	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
6	Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b • Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum

7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta tender berkompetisi secara sehat dan adil	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum
8	Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa log in pengguna)	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum
9	Data Pengguna LPSE	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum
10	Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa log in pengguna)	• Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.; • Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; • Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum
11	Data Proses Pemilihan Penyedia	UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b ,	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia , untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum

12	LPSE Support	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf h ,	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya , sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada public	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum
13	Data log in akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf b dan c	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada public mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada system	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum
14	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015	Dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.	Informasi yang terjamin	Sampai audit selesai

Ditetapkan di Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 Mei 2025

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU



THOMAS LARFO DIMAIRA, ST, MM  
 Pembina  
 NIP. 19790529 200604 1 006